



**PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022 disusun berdasarkan bahan dan data yang diperoleh dari pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis disusun, semoga segala program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bengkalis, 15 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH,



H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T
PEMBINA UTAMA MUDA
NP. 19710522 199101 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1-11
BAB II Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis	12-18
BAB III Penutup	19

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1-11
BAB II Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis	12-18
BAB III Penutup	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang –Undang Pembentukan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan urusan Wajib Pengawasan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas antara lain :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut :

- a) Inspektur Daerah;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - (1) Subbagian Analisa dan Evaluasi ;
 - (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan ;
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional;

- (c) Inspektur Pembantu I, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor ;
- (d) Inspektur Pembantu II, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- (e) Inspektur Pembantu III. terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- (f) Inspektur Pembantu IV. terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- (g) Inspektur Pembantu V. terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- (h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Kepada :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2029 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- h. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis;

i. Surat Bupati Bengkalis Nomor : 100.1.1.7/Tapem-Setda/742 tentang Permintaan Data/Bahan Penyusunan LKPJ dan LPPD Tahun Anggaran 2023.

b. Jumlah Penduduk

Kabupaten Bengkalis yang terdiri Dari 11 Kecamatan, 136 Desa dan 19 kelurahan dengan Jumlah Penduduk **658.846** Jiwa dengan rincian untuk Laki-laki berjumlah **336.794** Jiwa sedangkan untuk Perempuan berjumlah **422.052** Jiwa, untuk data keseluruhan Kabupaten Bengkalis perkecamatan bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	46,885	45,246	92,131
2	Bantan	23,571	22,541	46,112
3	Bukit Batu	11,661	11,235	22,896
4	Mandau	84,965	81,863	166,828
5	Rupat	20,789	19,761	40,550
6	Rupat Utara	8,695	8,318	17,013
7	Siak Kecil	14,426	13,837	28,263
8	Pinggir	39,516	37,830	77,346
9	Bandar Laksamana	9,838	9,176	19,014
10	Talang Muandau	17,111	16,040	33,151
11	Bathin Solapan	59,337	56,205	115,542
Jumlah		336,794	322,052	658,846

c. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan 136 Desa dan 9 Kelurahan, untuk mengetahui secara rinci jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa
1.	BENGKALIS	1. Kota Bengkalis 2. Damon 3. Rimbas Kampung	1. Kelapapati 2. Pendekik 3. Pangkalan Batang 4. Sebauk 5. Teluk Latak 6. Meskom 7. Senggoro 8. Air Putih 9. Sungai Alam 10. Penampi 11. Temeran 12. Penebal 13. Pematang Duku 14. Ketam Putih 15. Kelemantan 16. Sekodi 17. Wonosari 18. Kuala Alam 19. Kelebuk 20. Palkun 21. Sungai Batang 22. Prapat Tunggal 23. Simpang Ayam 24. Senderak 25. Kelemantan Barat 26. Damai 27. Pangkalan Batang Barat 28. Pematang Duku Timur
2.	BANTAN		1. Bantan Tengah 2. Bantan Air 3. Bantan Tua 4. Teluk Pambang 5. Selat Baru 6. Teluk Lancar 7. Kembung Lancar 8. Jangkang 9. Muntai 10. Resam Lapis

No	Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa
			11. Berancah 12. Ulu Pulau 13. Mentayan 14. Pambang Pesisir 15. Suka Maju 16. Pambang Baru 17. Kembung Baru 18. Pasiran 19. Bantan Sari 20. Bantan Timur 21. Teluk Papal 22. Muntai Barat 23. Deluk
3.	BUKIT BATU	1. Sungai Pakning	1. Sejangat 2. Dompas 3. Pangkalan Jambi 4. Sungai Selari 5. Buruk Bakul 6. Bukit Batu 7. Sukajadi 8. Batang Duku 9. Pakning Asal
4.	BANDAR LAKSAMANA		1. Parit 1 Api-api 2. Temiang 3. Api-api 4. Tenggayun 5. Sepahat 6. Bukit Kerikil 7. Tanjung Leban
5.	SIK KECIL		1. Lubuk Muda 2. Tanjung Belit 3. Sungai Siput 4. Sepotong 5. Lubuk Gaung 6. Langkat 7. Sadar Jaya 8. Sungai Linau 9. Bandar Jaya 10. Muara Dua 11. Tanjung Damai 12. Sumber Jaya 13. Lubuk Garam 14. Liang Banir 15. Tanjung Datuk 16. Koto Raja 17. Sungai Nibung

No	Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa
6.	MANDAU	1. Air Jamban 2. Babusalam 3. Batang Serosa 4. Balik Alam 5. Duri Barat 6. Duri Timur 7. Gajah Sakti 8. Talang Mandi 9. Pematang Pudu	1. Harapan Baru 2. Bathin Bertuah
7.	BATHIN SOLAPAN		1. Petani 2. Air Kulim 3. Buluh Manis 4. Bumbung 5. Pamesi 6. Kesumbo Ampai 7. Bathin Sobanga 8. Sebangar 9. Boncah Mahang 10. Balai Makam 11. Tambusai Batang Dui 12. Simpang Padang 13. Pematang Obo
8.	PINGGIR	1. Titian Antui 2. Balai Raja	1. Balai Pungut 2. Muara Basung 3. Pinggir 4. Semunai 5. Tenganau 6. Sungai Meranti 7. Pangkalan Libut 8. Buluh Apo
9.	TALANG MUANDAU		1. Tasik Serai 2. Tasik Serai Barat 3. Kuala Penaso 4. Beringin 5. Koto Pait Beringin 6. Melibur 7. Tasik Serai Timur 8. Tasik Tebing Serai 9. Serai Wangi

No	Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa
10.	RUPAT	1. Batu Panjang 2. Pergam 3. Terkul 4. Tanjung Kapal	1. Sungai Cingam 2. Teluk Lecah 3. Makeruh 4. Hutan Panjang 5. Pangkalan Nyirih 6. Sukarjo Mesin 7. Darul Aman 8. Parit Kebumen 9. Sri Tanjung 10. Pancur Jaya 11. Pangkalan Pinang 12. Dungun Baru
11.	RUPAT UTARA		1. Tanjung Medang 2. Teluk Rhu 3. Tanjung Punak 4. Kadur 5. Titi Akar 6. Hutan Ayu 7. Suka Damai 8. Putri Sembilan

d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat daerah dan Pegawai Pemerintah

1) Jumlah Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	2
1	BUPATI BENGKALIS
2	SEKRETARIAT DAERAH
3	SEKRETARIS DAERAH
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
7	SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKALIS
8	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BENGKALIS
9	DINAS KESEHATAN KAB. BENGKALIS
10	DINAS SOSIAL KAB. BENGKALIS
11	DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. BENGKALIS
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BENGKALIS
13	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KAB. BENGKALIS
14	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BENGKALIS
15	DINAS PERIKANAN KAB. BENGKALIS
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BENGKALIS
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERLAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BENGKALIS
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKALIS

1	2
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BENGKALIS
20	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BENGKALIS
21	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI KAB. BENGKALIS
23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BENGKALIS
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. BENGKALIS
25	DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. BENGKALIS
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BENGKALIS
27	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. BENGKALIS
28	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN & OLAH RAGA KAB. BENGKALIS
29	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. BENGKALIS
30	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB. BENGKALIS
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BENGKALIS
32	RSUD BENGKALIS
33	RSUD DURI
	BADAN
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BENGKALIS
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BENGKALIS
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BENGKALIS
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB. BENGKALIS
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KAB. BENGKALIS
6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BENGKALIS
7	BADAN KESETUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BENGKALIS
	BAGIAN
1	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS
2	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS
3	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS
4	BAGIAN KERJA SAMA SETDA KABUPATEN BENGKALIS
5	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS
6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS
7	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN BENGKALIS
8	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS
9	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS
10	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS
11	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS
12	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS

1	2
	KECAMATAN
1	KECAMATAN BENGKALIS
2	KECAMATAN BANTAN
3	KECAMATAN BUKIT BATU
4	KECAMATAN SIAK KECIL
5	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
6	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
7	KECAMATAN MANDAU
8	KECAMATAN PINGGIR
9	KECAMATAN TALANG MUANDAU
10	KECAMATAN RUPAT
11	KECAMATAN RUPAT UTARA

2) Unit Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pilihan bidang pengawasan adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis berjumlah 41 Orang, sebagai berikut :

a) Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	26
2	Perempuan	15
Jumlah		41

b) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	11
3	S1	20
4	D3	1
5	SMA	10
Jumlah		41

c) Berdasarkan Pangkat

No	Golongan	Jumlah
1	IV	13
2	III	222
3	II	6
4	I	-
Jumlah		41

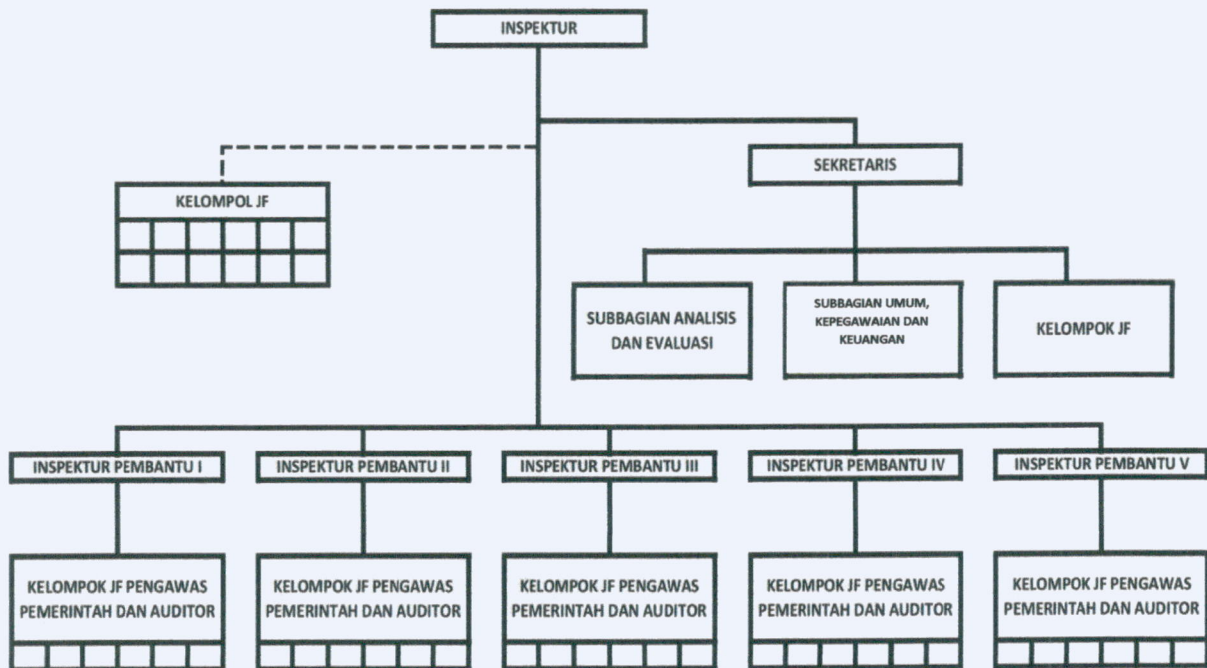
d) Berdasarkan Esselonering

No	Esselonering	Jumlah
1	Ess II b	1 Orang
2	Ess III a	6 Orang
3	Ess III b	0 Orang
4	Ess IV a	2 Orang
Jumlah		9 Orang

e). Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah
1	Auditor	
	Auditor Madya	2
	Auditor Muda	6
	Auditor Pertama	4
	Auditor Penyelia Pertama	1
2	P2PUPD	
	P2UPD Madya	3
	P2UPD Muda	1
3	Perencana Ahli Muda	
	Perencana Ahli Muda	1
Jumlah		18

f) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

1. Target Kinerja Dalam

SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Level Kapabilitas APIP	Level 3
	2. Predikat Akuntabilitas Kinerja APIP	BB
2. Meningkatnya Capaian Kinerja atas Hasil Pengawasan pada Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP	75 %
	3. Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	65 %
3. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah	1. Persentase Tindak Lanjut atas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	85 %
	2. Persentase Capaian MCP Korsupgah Korupsi	85 %
4. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	1. Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3

2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 untuk masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100 %
	2. Predikat Akuntabilitas Kinerja APIP	BB	BB	100 %

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator yaitu :

- a. Level Kapabilitas APIP dengan target Level 3. Untuk indikator ini realisasinya Level Kapabilitas APIP Tahun 2023 mendapat level 3 dari BPKP, capaian kinerja 100%.
- b. Predikat Akuntabilitas Kinerja APIP, target kinerja Predikat BB realisasi Predikat BB capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran 2

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Meningkatnya Capaian Kinerja atas Hasil Pengawasan pada Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP	75 %	83,54 %	112 %
	2. Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	65 %	68 %	105 %

2. Optimalisasi Pengawasan Sisten Integritas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator sebagai berikut :
- Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP target kinerja 75%, dengan realisasi 83,54% dengan capaian kinerja 112%.
 - Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK target kinerja 65 %, realisasi kinerja 68% dan capaian kinerja 105 %.

Sasaran 3

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah	1. Persentase Tindak Lanjut atas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	85%	100%	118%
	2. Persentase Capaian MCP Korsupgah Korupsi	85%	83%	98%

3. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah dengan indikator sebagai berikut :
- Persentase Tindak Lanjut atas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat target kinerja 85 %, dengan realisasi 100 % capaian kinerja 118 %.
 - Persentase Capaian MCP Korsupgah Korupsi target kinerja 85 %, realisasi dengan 83%, capaian kinerja sebesar 98 %.

Sasaran 4

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	1. Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100 %

4. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko dengan indikator sebagai berikut :
- a. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko target kinerja Level 3, dengan realisasi level 3 capaian kinerja 100 %.

3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran 1

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.Level Kapabilitas APIP	3	3	100	3	3	100%
2.Predikat Akuntabilitas Kinerja APIP	BB	BB	100	BB	BB	100%

Pada indikator Level Kapabilitas APIP tahun 2023 dengan target kinerja Level 3, dengan realisasi mendapat Level 3 atau dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 Level Kapabilitas APIP capaiannya tetap mendapat 100%.

Pada indikator Persentase Predikat Akuntabilitas Kinerja APIP tahun 2023 dengan Target Predikat BB Realiasi Predikat BB dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 Predikat Akuntabilitas Kinerja APIP tetap dengan capaian 100%

Sasaran 2

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP	-	-	-	75 %	83,54 %	112 %
2.Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	-	-	-	65 %	68 %	105 %

Pada indikator Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP pada tahun 2023 dengan target 75% Realisasi 83,54% dengan capaian kinerja 112%, sedangkan pada tahun 2022 tidak menjadi indikator kinerja.

Pada indikator Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun 2023 dengan target 65% Realisasi 68% dengan capaian kinerja 105%, sedangkan pada tahun 2022 tidak menjadi indikator kinerja.

Sasaran 3

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Tindak Lanjut atas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	75%	100%	133%	85%	100%	118%
2. Persentase Capaian MCP Korsupgah Korupsi	75%	82%	109%	85%	83%	98%

Pada indikator Persentase Tindak Lanjut atas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2022 dengan target 75% realisasi 100% dengan capaian kinerja 133. Dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan dengan target 85% realisasi 100% dengan capaian kinerja 118%.

Pada indikator Persentase Capaian MCP Korsupgah Korupsi pada tahun 2022 dengan target 75% realisasi 82% dengan capaian kinerja 109%. Dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan dengan terget 85% realisasi 83% dengan capaian kinerja 98%.

Sasaran 4

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Level Maturitas Manajemen Risiko	-	-	-	3	3	100%

Pada indikator Level Maturitas Manajemen Risiko tahun 2023 dengan target Level 3 realisasi Level 3 dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2022 tidak merupakan indikator kinerja.

4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Level Kapabilitas APIP	3	3	100	3	3	100%
Capaian						100 %

Pada indikator Level Kapabilitas APIP tahun 2022 dengan realisasi Level 3 capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan target yang ditetapkan di RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Level Kapabilitas APIP, capaian kinerja indikator ini sudah Level 3.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	100 %	77 %	23 %
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja atas Hasil Pengawasan pada Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	108,50 %	97 %	3 %
3.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah	108 %	88 %	12 %
4.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	100 %	96 %	4 %

Pencapaian sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP yang terdiri dari dua Indikator (1) Level Kapabilitas APIP dengan target indikator utama Level 3 dan Capaian Kinerja 100%, (2) Predikat Akuntabilitas Kinerja APIP dengan target kinerja utama BB capaian kinerja 100% dari kedua Indikator tersebut tingkat efisiensi anggaran sebesar 23% dari realisasi anggaran 77% dengan capaian kinerja sasaran 100%, Secara umum tidak terdapat

permasalahan pada pelaksanaan kedua indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Capaian Kinerja atas Hasil Pengawasan pada Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari dua Indikator (1) Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP dengan target indikator utama 75 % dengan capaian kinerja 112%, (2) Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK target kinerja utama 65 % dengan capaian kinerja 105 %, dari kedua Indikator tersebut tingkat efisiensi anggaran sebesar 3% dari realisasi anggaran 97% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 108,50%, Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan ketiga indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari dua Indikator (1) Persentase Tindak Lanjut atas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dari Target Kinerja Utama 85 % dan capaian kinerja 118 %, (2) Persentase Capaian MCP Korsupgah Korupsi target kinerja utama 85 % dengan capaian kinerja 98% dari kedua Indikator tersebut tingkat efisiensi anggaran sebesar 12% dari realisasi anggaran sebesar 88% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 108%, Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan kedua indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko yang terdiri dari satu Indikator (1) Level Maturitas Manajemen Risiko dari Target Kinerja Utama Level 3 dan capaian kinerja 100 %, Indikator ini tingkat efisiensi anggaran sebesar 4% dari realisasi anggaran sebesar 96 % dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan kedua indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Sasaran	Capaian kinerja	Anggaran		
		Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Kapabilitas APIP	100	19.042.572.158	14.509.521.559	77
Meningkatnya Capaian Kinerja atas Hasil Pengawasan pada Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	108,50	2.524.610.000	2.440.212.852	97
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah	108	854.378.000	746.589.369	88
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	100	713.000.000	685.066.702,00	96

Seperti yang disampaikan sebelumnya salah satu faktor dalam meningkatkan capaian kinerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis serapan anggaran belanja dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

Sasaran 1

Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan realisasi anggaran 77% dengan Program Pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Sasaran 2

Meningkatnya Capaian Kinerja atas Hasil Pengawasan pada Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi anggaran 97% dengan Program Pendukung yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Sasaran 3

Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah dengan realiasi anggaran 88% dengan Program pendukung yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Sasaran 4

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko dengan realiasi anggaran 96% dengan Program pendukung yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

BAB III**PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan bahan dan data yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 15 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH,



H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T
PEMBINA UTAMA MUDA
NP. 19710522 199101 1 001